



Nimboran, 6 Juli 2022

## SURAT KEBERATAN

Dengan Hormat,

Bersama dengan surat ini, kami menyampaikan keberatan dan protes kami terkait dengan dilakukan aktivitas pembongkaran hutan masyarakat adat Namblong oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Permata Nusa Mandiri (PNM) di wilayah Distrik Nimbokrang Lembah Grime Nawa Kabupaten Jayapura. Aktivitas ini dilakukan kurang lebih dalam kurun waktu tiga hari sejak tanggal 4 Juli 2022 hingga sekarang.

Aktivitas yang dilakukan oleh PT PNM ini jelas mengabaikan surat penghentian segala aktifitas pembongkaran hutan oleh PT PNM telah di keluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Jayapura tertanggal 23 Februari 2022 dengan nomor surat 008/64/DPM-PTSP/2022 perihal Penghentian sementara kegiatan di areal HGU, atas nama (a.n.) PT Permata Nusa Mandiri (PNM) Tahun 2021-2022.


Dalam konteks ini, PT PNM terbukti tidak memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan konfliknya dengan masyarakat adat Namblong. Oleh karenanya Kami Masyarakat Adat Namblong menuntut:

- Bupati Jayapura untuk secara tegas dengan waktu sesingkat-singkatnya mencabut Izin Lingkungan dan Izin Lokasi PT Permata Nusa Mandiri;
- Bupati Jayapura untuk merekomendasikan kepada Gubernur dan pejabat terkait untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan PT Permata Nusa Mandiri;
- Gubernur Papua dan pejabat terkait untuk secara tegas dengan waktu sesingkat-singkatnya mencabut Izin Usaha Perkebunan PT Permata Nusa Mandiri;
- Bupati dan Gubernur mengembalikan tanah yang dibebani izin-izin PT Permata Nusa Mandiri kepada adat masyarakat Namblong;
- Menteri ART/BPN dan Pejabat Kanwil terkait untuk secara tegas dengan waktu sesingkat-singkatnya mencabut Hak Guna Usaha (HGU) PT Permata Nusa Mandiri;

Besar harapan kami bahwa persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, adanya penghentian aktivitas perusahaan dan pemulihan situasi termasuk mengembalikan hak masyarakat adat Namblong.

Hormat Kami,

Ketua Dewan Adat Suku Namblong  
Dewan Adat Daerah Grime Nawa.  
  
Matius Sawa

Ketua ORPA  
  
Rosita Tecuari